

PERANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PROGRAM AKUNTABILITAS INFORMASI PUBLIK

Oleh:

Apriman Jaya Laia ¹⁾

Irene Silviani ²⁾

Yafety Laia ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

Aprimanjaya19@gmail.com ¹⁾

irenesilviani@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Based on the preliminary research, the implementation of the implementation function in the public information accountability program is not transparent and accountable. This is the main factor in knowing the causes of the implementation system in accountability and public services in research with the role of the Provincial Manpower Office in the public information accountability program. The objectives of this research are: (1). To find out how the Manpower Office of North Sumatra Province in providing its role in the implementation of the accountability system and public services, (2). To find out whether human resources affect the quality of performance on the accountability of public information at the Manpower Office of North Sumatra Province. This study uses qualitative methods and uses both primary and secondary sources, and uses qualitative descriptive data analysis. Research subjects or informants are staff and employees of the Manpower Office of North Sumatra Province. Based on the results of the study, it was concluded that the Manpower Office of North Sumatra Province in carrying out public services, had been carried out well, transparently and accountably to realize a government system that was clean, honest and free from collusion, corruption and nepotism.

Keywords: Role, Accountability, and Public Information

ABSTRAK

Berdasarkan studi awal, pelaksanaan fungsi penyelenggaraan dalam program akuntabilitas informasi publik tidak transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi faktor utama dalam mengetahui penyebab terhadap sistem penyelenggaraan dalam akuntabilitas dan pelayanan publik pada Penelitian dengan peranan Disnaker Provsu dalam program akuntabilitas informasi publik. Tujuan Penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perannya dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas dan pelayanan publik, (2). Untuk mengetahui apakah sumber daya manusia mempengaruhi kualitas kinerja terhadap akuntabilitas informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan sumber baik primer & sekunder, serta menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Subjek penelitian atau informan adalah Staf dan pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pelayanan publik, sudah terlaksana dengan baik, secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik bersih, jujur dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kata kunci : Peranan, Akuntabilitas , Dan Informasi Publik

PENDAHULUAN

Menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien, serta mengoptimalkan fungsi kompetensi membina, mengendalikan dan pengawasan pegawai bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi pegawai negeri sipil untuk sistem prestasi kinerja. Pegawai ASN memiliki peran penting sebagai aparatur Negara dalam hal mengadakan dan melakukan kegiatan pemerintahan dan membangun Negara untuk mencapai tujuan Negara. Dalam organisasi pemerintahan yang ada (DINASKER) Provinsi Sumatera Utara, tugas seorang kepala dinas sebagai seorang pemimpin merupakan tangan kanan dari Gubernur untuk membantu pimpinan pusat menjalankan pemerintahan di daerah agar berjalan dengan semestinya. Peran pemimpin dalam suatu organisasi menjadi indikator keberhasilan dari organisasi tersebut. Untuk terciptanya suatu Negara tersebut harus adanya memiliki kedisiplinan merupakan suatu keadaan atau suasana yang tercipta dengan tertib dan teratur, dimana setiap orangnya yang berada dalam suatu organisasi atau instansi tunduk, dan serta taat terhadap peraturan yang berlaku baik secara tulisan maupun secara lisan. Peran Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi faktor penting untuk diperhatikan. Untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pemerintah memberdayakan masyarakat untuk menilai kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil ataupun ASN sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan secara

optimal. Untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik maka, pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Dengan sistem penerapan SAKIP ini sebagai implementasi terciptanya efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam program SAKIP harus memiliki perencanaan kinerja yang terintegrasi terhadap pelayanan publik sehingga setiap program kinerja pemerintah memiliki hasil yang jelas yang dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan dari penjelasan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik dengan untuk melakukan penelitian dengan judul PERANAN DISNAKER PROVSU DALAM PROGRAM AKUNTABILITAS INFORMASI PUBLIK 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia mempengaruhi kualitas kinerja terhadap pada akuntabilitas informasi publik pada DisnakerProvsu.
2. Bagaimana peran DisnakerProvsu dalam penyelenggaraansistem akuntabilitas dan pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran merupakan suatu perilaku yang diinginkan sebagai proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok saat menduduki suatu posisi untuk menjalankan suatu fungsi dan tanggung jawab dalam masyarakat. Peran DisnakerProvsu untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan pada teori menurut Soejono Soekanto (dalam bukunya 2021:212)

menyatakan bahwa peranan merupakan suatu aspek dinamis atau kedudukan (status). Artinya pemerintah mempunyai kedudukan yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara spesifik masyarakat harus memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik berkualitas. Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang mewujudkan pertanggungjawab seseorang atau lembaga yang berkaitan dengan sistem administrasi. Dengan demikian akuntabilitas lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya melayani rakyat harus bertanggungjawab secara tidak langsung maupun langsung ke masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori tentang akuntabilitas Menurut Straling dalam Kumorotomo (2013:4) mengatakan bahwa adalah akuntabilitas suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga publik yang berbagai macam keputusan atau kebijakan yang telah dikeluarkan. Lembaga publik dalam akuntabilitas lebih berperan aktif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah disepakatin untuk kepentingan masyarakat. Pada prinsip subsidiarity adalah salah satu unsur dasar untuk memberlakukan undang- undang ini dalam akuntabilitas pada sistem pemerintahan daerah. Untuk lebih meningkatkan penerapan akuntabilitas pada pelayanan birokrasi publik, maka pemerintahan daerah menggunakan SAKIP. Terlaksananya suatu penyelenggaran akuntabilitas (SAKIP) mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani pelayanan publik, Pada pasal 3 UU no 25 tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik antar lain: a.

Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik. b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan sistem pelayanan publik yang layak sesuai dari asas-asas umum pemerintahan dan organisasi yang baik c. Terpenuhinya pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan peraturan uu yang berlaku d. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sabagai abdi di masyarakat. Terhadap penyelenggara pelayanan kepada masyarakat tetap harus dikontrol dengan baik guna untuk peningkatan hasil capaian dari pelayanan publik.

Kontrol pelayanan tidak terlepas dari kontrol kinerja aparatur pelayanan publik. Kinerja aparatur adalah bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, karena kinerja adalah hasil melakukan proses terhadap pelayanan itu sendiri. Pada prinsipnya sistem penyelenggara pemerintahan good governance adalah sebagai tujuan utama dalam penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori tentang tentang good governance pelayanan publik pendapat Idrus dalam buku Hayat (2017:201), mengungkapkan bahwa pembangunan good governance didasarkan pada aspek akuntabilitas, transparan, dan partisipatif yang menggambarkan bahwa pemerintah

hanyalah fasilitas dalam pencapaian tujuan tersebut, sementara masyarakat dan dunia usaha harus dikedepankan karena globalisasi ditentukan oleh daya saing dan dunia usaha adalah pelaku utamanya. 4.

METODE PENELITIAN

Pendekatan metode yang akan digunakan pada penelitian penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada metode penelitian deskriptif peneliti akan berusaha akan menggambarkan secara terperinci atau komprehensif tentang bagaimana Peranan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas dan pelayanan publik pada dinas tenaga kerja provinsi sumatera utara. Pada pendekatan deskriptif penulis akan mendapatkan pendekatan objek penelitian untuk mendapatkan informasi dalam proses wawancara. Melalui hasil dilapangan, sehingga senantiasa akan menginterpretasikan dari penjelasan yang telah diberikan oleh informan. Dalam melaksanakan wawancara dengan informan, peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu, Peranan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Program Akuntabilitas Inormasi Publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas dan pelayanan publik pada DisnakerProvsu. Dalam menjalankan tugas pemerintahan terdapat dua seksi yaitu ka. Subbag program akuntabilitas dan informasi, ka.subbag umum dan kepengawaian. Mempunyai tanggungjawab dan fungsi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara peranan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan

akuntabilitas dan pelayanan publik Bapak Drs. Pukka Situmorang Ka. Subbag Program, Akuntabilitas & Informasi Publik disnakerprovsu (pada tanggal 24 juni 2021), menyatakan bahwa Dinas dalam penyelenggaraan akuntabilitas pelayanan publik adalah suatu bentuk mewujudkan pelaksanaan proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan, dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan akuntabilitas sebagai terwujudnya pertanggungjawaban pemerintah atas semua kebijakan yang telah dikeluarkan. SAKIP sebagai katalisator terciptanya penguatan implementasi berbasis kinerja.

Pada sistem ini ditetapkan berbagai sasaran strategis pada lembaga pemerintahan sesuai dari sasaran pembangunan nasional. Adapun sasaran strategis diharapkan diikuti dengan indicator keberhasilan dari kinerja yang diharapkan dan harus mempunyai suatu target yang terukur dan jelas. Tujuan sistem SAKIP ini dapat mendorong terlaksananya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasarannya adalah untuk menghasilkan kinerja yang akuntabel, efektif dan efisien serta responsive dalam menanggapi keluhan masyarakat, serta terwujudnya transparan informasi instansi pemerintah, dan meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan agar dapat memberikan hasil dari laporan kinerja yang berkualitas. a. Rencana startegis dokumen perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan b. Rencana kinerja dokumen Renja dalam kerangka hasil capaian tujuan dan sasaran dalam rencana startegi. c. Laporan

akuntabilitas (LAKIP) Indikator dalam kualitas kinerja terhadap pada akuntabilitas dan informasi publik adalah pembagian tupoksi serta mempunyai kejelasan terhadap pelaksanaan tugas, memiliki kemampuan dalam menyusun kegiatan startegis, serta memiliki berdampak hasil dalam memberikan pelayanan. berdasarkan pada teori yang di kemukakan oleh Menurut Sumarsono dalam buku Hayat (2017:106) menyatakan bahwa: a. Sumber daya aparatur merupakan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam memberikan kepuasan terhadap jasa atau layanan yang diberikan. b. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja memberikan jasa atau usaha dari kerja tersebut. Sehingga didalam instansi atau organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia didalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memandai untuk menjalankan tugas dan fungsinya, disertai dengan sumber dana yang cukup dan fungsional. c. Lembaga Negara yang memiliki regulasi yang terstruktur dan sistematis secara administratif maupun implementatif dengan orientasi kepada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peranan dinas tenaga kerja provinsi sumatera utara dalam sistem penyelenggaraan akuntabilitas dan pelayanan publik penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintah berdaya guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Peranan dalam penyelenggaraan sistem

akuntabilitas kinerja SAKIP sebagai instrument good governance. hasilnya pada penerapan SAKIP ini sudah berjalan dengan mencapai hasil baik. Keberhasilan dalam penyelenggara dalam pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mencapai tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara menyusun beberapa program kegiatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tetapi selain pemerintah membantu masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik, akan juga terbantu juga kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

1. Kualitas kinerja faktor mempengaruhi terhadap pada akuntabilitas dan informasi publik adalah stuktur organisasi mempunyai peran penting terhadap kualitas pelayanan. Pada umumnya struktur organisasi harus disusun dengan baik antara pembagian tugas, sehingga dalam wewenang tugas dan tanggung jawabnya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Dalam pengendalian kualitas pelayanan sangat berkaitan dengan kemampuan aparat sehingga dalam hal ini harus ikut dalam menentukan kualitas pelayanan publik.

Sistem pelayanan harus mempunyai satu kesatuan sebagai bentuk rangkaian pelayanan yang saling terkait dengan prosedur pelayanan, dan syarat pelayanan yang jelas. Faktor ini mempengaruhi kualitas kinerja terhadap akuntabilitas ini

pemerintahan secara khususnya dinas tenaga kerja provinsi sumatera memiliki startegis dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam pelayanan publik yaitu pemerintahan menyediakan SOP sehingga pembagian kinerja dalam pelayanan publik yang dapat di pertanggungjawabkan sehingga setiap pengambilan keputusan dapat lebi cepat dan fleksibel serta menunjang kualitas pelayanan publik, pemerintah juga memanfaatkan sistem pengelolaan sumber daya manusia dengan mengaplikasikan terhadap perkembangan teknologi saat ini, serta pemerintah mengkaji ulang sistem yang tertata untuk menekan pungli untuk meningkatkan pelayanan berkualitas secara good governance.

2. SARAN a. Pemerintahan harus memiliki kewenangan dalam meningkatkan penyelenggaraan sistem akuntabilitas dan pelayanan publik, sehingga lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah harus mengaudit kembali hasil kinerja yang telah di terapkan saat ini di masyarakat guna supaya untuk memastikan agar pelayanan publik yang di masyarakat itu betul-betul berjalan secara efektif dan efisien. b. Setiap aparatur birokrasi pemerintahan saat ini harus memiliki daya kemampuan yang sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat dengan secara jujur dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Imam.2013 Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara Hayat, .2017 Manajemen Pelayanan Publik. Malang: PT Raja Grafindo Persada.

Indradi, Sjamsuddin, Sjamsiar, .2017 Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan.

Malang: Intrans Publishing. Kumorotomo, Wahyudi. 2008 Akuntabilitas Birokrasi Publik. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Mulyadi, Deddy, dkk. 2018 Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung Alfabeta. Pasolong, Harbani.2013 Kepemimpinan Birokrasi.Bandung: Alfabeta,CV. Saleh, Choirul.dkk,2020Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. Bandung: PT Refika Aditama.

Sedarmayanti, 2004 Membangun Manajemen Sistem Kinerja Gun Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Pemerintah Yang Baik), Bandung, Mandar Maju Saiful, dkk. 2008 Reformasi Pelayanan Publik, Malang, Averroes Press Soekanto,dkk.2012 (Dalam Buku Yang Berjudul Sosiologi Suatu Pengantar) Jurnal Baruna Horizon (Vol. 3, No. 2, Desember 2020: Hal 224), Pada Penelitian Yang Berjudul, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya.

Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Mimbar, (Vol. 31, No. 2 Desember, 2015: Hal 263-270) Dalam Penelitian Yang BerjudulAkuntabilitas Pelayanan Publik: (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar). Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 22 Dan Nomor 25 Tahun 1999.

Tentang Menetapkan Peraturan Pemerintahan Daerah Terhadap Akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Tentang

Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara